

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah telah menorehkan bahwa perjalanan anak bangsa dalam upaya mencapai suatu cita-cita serta pergerakannya tidak terlepas dari peran mahasiswa, hal ini terbukti bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat esensial didalam menjawab setiap gejolak-gejolak sosial yang menuju pada perubahan sebuah tatanan masyarakat madani. Lembar sejarah telah membuktikan peran pemuda dan mahasiswa saat sumpah pemuda 1928 yang membulatkan satu tekad keyakinan persatuan dan kesatuan.

Seiring dengan berjalannya waktu sejarah membuktikan pula bahwa protes-protes mahasiswa pada tahun 1974, tahun 1978 dan tahun 1980-an adalah bukti kongkrit betapa mahasiswa memegang andil besar di republik ini. Tak pelak protes-protes tersebut mencapai klimaksnya pada 98 ketika rezim totaliter Orde Baru mampu ditumbangkan melalui gerakan reformasi. Andres Uhlin¹ menyebut kepeloporan mahasiswa itu sebagai awal lahirnya gelombang demokratisasi di indonesia. Mahasiswa tidak hanya sebagai penggerak lahirnya demokrasi serta pengawal proses demokrasi, lebih dari itu mahasiswa sebagai simbol perlawanan sebuah rezim yang totaliter.

Mahasiswa memiliki kesadaran politik yang tinggi sebagai basis analisis terhadap ekonomi politik dan lingkungan sosialnya. Kepeloporan mahasiswa

¹. Lebih jelas baca Andres Uhlin, *Indonesia and the 'Third Wave Of Democrtization' The Indonesia Pro-Democracy Movement in a Changing World*, Perbi Curzon Press, London, 1997. di

ditingkat *grass root* tidak dapat diragukan lagi. Mereka mampu berperan sebagai pembuat solidaritas (*solidarity maker*) antara negara dan rakyat bawah untuk menyuarakan dan mengampanyekan kepentingan-kepentingan rakyat bawah.

Tumbuhnya kepekaan mahasiswa terhadap persoalan masyarakat ini menurut Arbi Sanit² disebabkan oleh paling tidak lima hal. *Pertama*, sebagai kelompok masyarakat yang memiliki pendidikan terbaik, mahasiswa memiliki pandangan yang cukup luas untuk dapat bergerak di semua lapisan masyarakat. *Kedua*, sebagai golongan masyarakat yang paling lama mengalami pendidikan, mahasiswa telah mengalami proses sosialisasi politik terpanjang diantara angkatan muda. *Ketiga*, kehidupan kampus membentuk gaya hidup unik dikalangan mahasiswa, dan terjadi akulturasi sosial budaya tinggi di antara mereka. *Keempat*, mahasiswa sebagai golongan yang akan memasuki lapisan atas dari susunan kekuasaan, struktur ekonomi, dan akan memiliki keistimewaan tertentu dalam masyarakat, adalah kelompok elit dari kalangan kaum muda. *Kelima*, seringnya mahasiswa terlibat dalam pemikiran, perbincangan, dan penelitian berbagai permasalahan masyarakat, memungkinkan mereka tampil dalam forum yang kemudian mengangkatnya kejenjang karier sesuai dengan keahliannya.

Hingga kini masyarakat (seluruh komponen bangsa ini) tetap menaruh apresiasi tinggi kepada mahasiswa agar terus memainkan peran penting itu dalam kehidupan sosial politik berbangsa dan bernegara. Apa yang dilakukan oleh mahasiswa sebenarnya tidak lain karena panggilan hati nurani, idealisme dan semangat juang yang tinggi bagi tegaknya keadilan dan demokrasi yang

². Arbi Sanit dalam Karim, M Rusli, *HMI MPO Dalam Kemelut Modernisasi Politik di Indonesia*, 1997. hal.95. Lihat juga Arbi Sanit, *Pergolakan melawan kekuasaan Gerakan*

sesungguhnya di negara ini. Sangat wajar apabila kemudian banyak orang memberikan sebutan tinggi kepada mahasiswa, mulai *agent of change*, *solidarity maker*, *pressure group*, *sosial force* dan *moral force*.

Pasca 98 setelah lengsernya Soeharto kekuatan mahasiswa sebagai *agen of change*, *solidarity maker*, *pressure group*, *sosial force* dan *moral force*, sudah mulai dipertanyakan dan tercerai berai kedalam kekuatan kelompok-kelompok tertentu yang *fragmented*. Selain kehilangan *ghiroh* perjuangan, musuh bersama (*common enemy*), cenderung apatis dan apolitis, mereka juga kehilangan budaya kritisnya. Mahasiswa telah mengalami *misorientasi* (yang telah sampai pada tingkat *krusial*). Gerakan mahasiswa selama ini sangat *elitis*, *momentum* dan cenderung terjebak pada *propaganda elit*, sehingga tidak mampu memberikan solusi apa-apa bagi rakyat.

Dalam banyak hal gerakan moral yang dimotori mahasiswa lebih mencerminkan pertarungan elit. Isu yang diangkat seputar isu elit (*hight politic*) bukan lagi isu-isu *populis*, seperti pendidikan murah, pengusiran TKI, penanggulangan banjir dan bencana alam, kenaikan BBM, pengangguran dan kekerasan jender. Tidak ada lagi *common issue* yang biasa menjadi ciri khas mahasiswa dalam setiap aksinya. Sebab mahasiswa sudah terbagi kedalam kelompok-kelompok elit yang memiliki *afiliasi politik* tertentu dengan penguasa. Yang sangat disayangkan adalah, gerakan mahasiswa saat ini kerap kali bukan murni atas *prefensi idealisme* dan *ideologi* mereka akan tetapi atas kepentingan dari kelompok lain yang menunggangi mereka dari belakang. Tarik menarik

Akhirnya yang terjadi kemudian adalah idealisme kalah dengan kepentingan pragmatis sesaat. Masuknya mantan aktifis mahasiswa ke beberapa partai politik menjelang pemilu legislatif beberapa waktu yang lalu adalah contoh lunturnya idealisme mahasiswa. Di saat yang sama di internal mahasiswa terjadi friksi dan polarisasi yang cukup tajam antar kelompok. Masing-masing dari kelompok mengklaim diri paling benar, yang pada akhirnya berakibat mahasiswa cenderung reaktif dan anarkis dalam menyikapi persoalan yang berkembang di masyarakat. Ambil contoh misalnya, naiknya BBM disikapi dengan menyandera mobil pengangkut BBM, yang kemudian aksi itu berimplikasi besar tidak hanya merugikan pemerintah akan tetapi juga masyarakat.

Dalam kondisi seperti ini, sudah pasti mahasiswa kehilangan daya kritisme pada pemerintah. Maraknya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme yang melibatkan para pejabat tinggi negara tidak banyak mendapatkan perlawanan (pressure) dari mahasiswa. Mahasiswa sibuk dengan aktifitas internal kampus masing-masing. Padahal, akibat KKN mereka inilah sebenarnya krisis bermula terjadi dan masyarakat yang menanggung beban hutang pemerintah. Akibat KKN ini pula negara kita menjadi salah satu negara terkorup di dunia. Gerakan moral yang dilakukan mahasiswa saat ini belum mampu menyentuh pada kebutuhan riil masyarakat.

Ada empat hal mengapa gerakan moral mahasiswa mengalami kegamangan. *Pertama*, tidak adanya saling percaya (trust) antar mahasiswa untuk mempertahankan isu bersama (common isu) atau perubahan fokus isu dari egaliter

Ketiga, perubahan orientasi cara hidup yang lebih liberal dan ini sangat berbeda dengan masyarakat bawah. *Keempat*, perubahan arah kebijakan kampus dan perubahan kelembagaan eksternal ikut mempengaruhi kegamangan gerakan mahasiswa. Keempat faktor ini saja menghantui setiap aktifitas mahasiswa dalam melakukan pressure-pressure politik terhadap kekuasaan. Kalau kemudian mahasiswa masih mengalami kegamangan seperti saat ini kedepan gerakan moral mahasiswa tidak akan mendapat simpati dari masyarakat karena tidak mempunyai bargaining position yang kuat terhadap pemerintah.

Dinamisasi gerakan mahasiswa hari ini mengalami kemandekan yang cukup parah dikarenakan banyak faktor. Pola gerakan aksi mahasiswa hari ini secara subjektif tidak berangkat dari kristalisasi penderitaan rakyat yang dimanifestasikan kedalam isu-isu untuk memperbaiki nasib rakyat. Satu hal yang terjadi, pengkritisan tidak terjadi pada proses politik, melainkan pada hasil.

Membandingkan fenomena yang terjadi pada angkatan 98 dengan kondisi mahasiswa hari ini, terdapat perbedaan yang mencolok. Ini dapat dilihat dari semakin lunturnya gerakan mahasiswa hari ini dalam mengangkat isu-isu kerakyatan, hanya beberapa elemen saja yang masih konsen dalam menggarap isu-isu tentang petani, buruh dan kaum yang dimiskinkan lainnya. Apakah ini merupakan perubahan pola gerak atau merupakan bagian dari sikap feodal dan fragmatis yang menyelimuti mahasiswa hari ini.

Padahal, keberadaan mahasiswa sebagai *agent of change* di republik ini sudah tidak bisa diragukan lagi. Kalau mahasiswa sudah tidak mampu

demokrasi selanjutnya. Sebab, mahasiswa tidak saja sebagai kontrol bagi pemerintah tetapi juga sebagai counter balance bagi kekuatan-kekuatan politik lainnya.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai sebuah organisasi mahasiswa dan merupakan bagian dari gerakan mahasiswa dimana dalam perjuangannya selalu konsen terhadap persoalan kebangsaan, keummatan dan kemahasiswaan. Perjalan HMI telah berjalan dalam kurun waktu yang panjang, dengan berbagai pengalaman pahit-manis, suka-duka serta pasang surut perjuangan. Kemampuan menanggulangi berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi telah mengantarkannya tumbuh dewasa hingga hari ini. Kehadirannya tidak hanya dirasakan bermamfaat bagi anggota dan pengurusnya, bagi dirinya sendiri melainkan telah memberikan andil yang besar bagi kemajuan masyarakat dan bangsanya. HMI telah menjadi bagian yang menyatu dengan masyarakat dan bangsanya. Karena dinamika HMI tidak terlepas dari perkembangan kemasyarakatan dan kebangsaan.

Pasca kongres jambi 1999 banyak pihak yang berharap akan adanya perubahan besar bagi HMI terutama dengan agenda kembali ke asas Islam. Tapi ternyata tidak membawa perubahan yang signifikan bagi kemajuan HMI. Paling tidak ada dua hal yang harus dievaluasi oleh HMI, *Pertama*, adanya paradoksal status HMI sebagai organisasi mahasiswa yang ternyata sampai sekarang belum optimal menampakkan identitas kemahasiswaannya. Identitas mahasiswa sebagai *agent of change*, sebagai *elit minority* yang selalu kritis terhadap elit politik,

kepada *mustad'afin* sampai sekarang belum teraktualisasi secara optimal. Hal ini belum lagi ditambah dengan simbol mahasiswa sebagai *icon* intelektual yang ternyata di HMI nuansa intelektualnya sudah mulai mengering dan tidak subur lagi. *Kedua*, sudah mulai bergesernya paradigma berHMI sebagai wadah berkader /bernalar berkader (berproses terus menerus dan menjadikan HMI sebagai alat) menjadi wadah berpolitik/ nalar etatis (berproses instan dan menjadikan HMI sebagai tujuan) sehingga dinamika yang terjadi di HMI selalu saja dimaknai sebagai nuansa politik. Akibatnya kemudian HMI mengalami krisis yang berkepanjangan. Dua hal inilah yang menjadi agenda besar yang selalu menghantui HMI sekarang ini seperti penyakit akut yang menahun yang menebar hampir keseluruhan kader HMI. Dan yang perlu dilakukan sekarang adalah berfikir untuk menguatkan kembali tradisi dan gerakan kultur yang selama ini menjadi kekuatan pinggiran di HMI.

Lebih lanjut kemudian penulis tertarik kemudian untuk meneliti seperti apa kemudian gerakan HMI pada tahun 2002-2005 karena pada tahun itu mulai terjadi pembenahan-pembenahan atau masa-masa transisi didalam gerakannya walaupun belum optimal untuk mengembalikan HMI sebagai bagian dari gerakan mahasiswa yang tentunya mempunyai keberpihakan yang jelas yaitu kepada kaum yang tertindas atau *mustad'afin*.

Hal ini sesuai dengan cita-cita awal pendirian HMI oleh Lafran Pane atas

“Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdian yang bernafaskan islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT”³.

Landasar pendirian HMI diatas, didasarkan atas delapan faktor yakni :

1) penjajahan belanda atas indonesia dan tuntutan perang kemerdekaan.
2) Kesenjangan dan kejumudan umat Islam dalam pengetahuan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam. 3) Kebutuhan dan pemahaman dan penghayatan keagamaan. 4). Munculnya polarisasi politik. 5). Berkembangnya paham dan ajaran komunis. 6). Kedudukan perguruan tinggi dan dunia kemahasiswaan yang strategis. 7). Kemajemukan bangsa Indonesia. 8). Tuntutan modernisasi dan tantangan masa depan.⁴ Bertitik tolak dari hal tersebut maka tujuan HMI mencakup dua hal yakni sebagai wahana untuk mempertinggi derajat rakyat dan negara Republik Indonesia, dan menegakkan serta mengembangkan agama islam. Dalam perjalanan aktifitas organisasi, tujuan tersebut lebih dikenal dengan istilah **komitmen kebangsaan dan komitmen keislaman atau keumatan.**

Dari cacatan tersebut diatas, maka jelas bahwa yang diinginkan HMI adalah adanya penghargaan terhadap harkat kemanusiaan dan menegakkan kedaulatan Republik Indonesia. Sebagai organisasi kader, HMI sangat menekankan pada aktifitas-aktifitas sosio-edukasi, yang tidak hanya memperpesar

³. Hasil-hasil Keputusan Kongres ke-21, 1998. hal.21

⁴. Agussalim Sitompul, *pemikiran Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tentang keislaman-*

C. Tujuan dan Mamfaat Penelitian

Tujuan Penelitian :

1. Meneliti pola gerakan mahasiswa pasca Reformasi terutama HMI Cabang yogyakarta.
2. Mengetahui arah dan perkembangan dari gerakan mahasiswa terutama HMI Cabang yogyakarta.
3. Mengetahui dinamika gerakan pasca Reformasi

Mamfaat Penelitian:

1. Memberikan sumbangan mengenai pengembangan pengetahuan tentang pola gerakan HMI Cabang yogyakarta secara menyeluruh, terutama dalam konteks sebagai organisasi sosial dan kemahasiswaan dan bukan organisasi politik praktis dalam gerakan reformasi yang sedang berlangsung.
2. Diharapkan mampu membangkitkan minat para penulis berikutnya dibidang yang sama sebagai tindak lanjut dari penulisan ini sehingga pemahaman tentang pemikiran HMI pasca Reformasi semakin lengkap.

D. Kerangka Dasar Teori

Kerangka Dasar Teori yang dimaksud adalah teori-teori yang digunakan

yang akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Kerangka dasar teori ini bersifat sistematis dan

Adapun beberapa definisi teori sebagai berikut:

Menurut Masri Singarimbun :

“Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi dan preposisi teori untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dan cara merumuskan antar konsep.”⁵

Menurut definisi teori ini mengandung tiga hal. *Pertama*, teori adalah preposisi antar konsep-konsep yang saling berhubungan. *Kedua*, teori merangkum secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep. *Ketiga*, teori merangkum fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungan.

Menurut Koentjaraningrat :

“Teori adalah merupakan pernyataan sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala dari yang diteliti dari satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat.”⁶

Dari kedua teori diatas maka kasarannya teori itu merupakan sarana pokok untuk menyatukan hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun alami yang hendak diteliti.

Adapun teori yang penulis gunakan adalah :

1. Pola

Secara umum pengertian pola adalah suatu bentuk atau gambaran tentang suatu hal yang khas dan berguna sebagai contoh atau model atas hal-hal yang telah diketahui sebelumnya.

⁵. Masri singarimbun dan sofian effendi, *metode penelitian survey*, LP3ES, Jakarta, 1989.hal 37.

Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa pola adalah system; cara kerja; bentuk (struktur) yang tetap.⁷

Sementara itu B.N Marbun⁸ didalam bukunya kamus politik mengatakan bahwa pola adalah sistem; cara kerja; bentuk (struktur yang tetap); corak; rencana.

Pola merupakan suatu sistem yang berbentuk dalam sebuah organisasi dengan suatu cara dan bentuk yang memiliki corak dan rencana tersendiri dalam melakukan sebuah aktifitas dalam kehidupan masyarakat.

Dengan mengacu pada pengertian tersebut diatas maka dapat dirumuskan pola adalah suatu gambaran proses kerja tertentu yang mengandung substansi dan tahapan-tahapan yang terencana ataupun insidental sehingga dapat diperkirakan dan / atau diukur hasil akhir dari proses kerja tersebut ini.

Tabel 1.1. Tipe Pola

Kategori	Tipe 1	Tipe 2
Bentuk/ sifat/ ciri	Spontan/ emosional tidak terorganisir	Terencana/kalkulasi/ terorganisir
Tujuan- sifat Tujuan	Mempertahankan/ memperbaiki/bukan perubahan mendasar	Mengubah secara mendasar

Tipe diatas lebih menunjukkan kepada kenampakan langsung dari gerakan dan belum memasukkan berbagai aspek atau variable lain yang turut ambil bagian dengan pengembangan.⁹

⁷. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II (Balai Pustaka, Jakarta, 1995).

1. Cara pandang terhadap masalah (bagaimana masalah dipahami)
2. Tujuan (apa dan kondisi bagaimana yang hendak dicapai)
3. Strategi, taktik dan tehnik (bagaimana mencapai tujuan)
4. Program (bentuk-bentuk aksi kongkrit yang dilakukan).

2. Reformasi

Apabila ditinjau secara harfiah makna “Reformasi” berasal dari kata inggris yaitu “Reform” yang berarti perbaikan reformasi dalam hal ini, dapat diartikan pula sebagai membentuk, menyusun, mempersatukan kembali agar lebih baik. Secara historis, sebenarnya sejauh konsepsi reformasi berakar dari adanya perubahan kehidupan beragama pada awal abad ke-16. saat itu sikap kekolotan rohaniawan agama khatolik yang ditentang oleh kalangan sendiri pada saat itu mereka melihat adanya berbagai kejanggalan dalam gereja katolik dengan adanya pertentangan tersebut maka diadakan gerakan reformasi agama dalam bentuk berbagai aspek kehidupan dalam rangka menata ulang atau memperbaharui proses kehidupan sosial, ekonomi dan politik dalam suatu negara.¹⁰

Mengenai reformasi di Indonesia keadaan tersebut lebih ditandai dengan Lengsernya soeharto dari kursi Kepresidenan pada tanggal 21 mei 1998 sesaat soeharto lengser Wakil Presiden B.J. Habibie, diambil sumpah yang akan ditentukan kemudian. Sejak itulah kemudian dinyatakan sebagai awal lahirnya reformasi oleh masyarakat. Sehingga dalam hal ini, sekalipun reformasi politik dalam versi masyarakat dan mahasiswa saat itu menghendaki pelaksanaan yang

⁹ Eric Hofer, *Gerakan Massa*, Terjemahan Masri Singarimbun, Jakarta, Yayasan obor Indonesia, 1998. hal.25

cepat atas dukungan kekuatan *people power*.¹¹ Sehingga memungkinkan adanya korban, namun disadari bahwa kecepatan dan resiko itu kemudian tidak mencapai revolusi secara utuh. Pada hakekatnya, reformasi “jalan tengah” tersebut dipilh rupanya demokrasi yang pada tujuan akhirnya adalah kehadiran dan keberlangsungannya dinegara kita.

Reformasi dapat juga didefinisikan sebagai upaya penataan kembali kehidupan berbangsa dan bernegara kearah yang lebih baik.¹² Atau menurut Kacung Marijan, Reformasi memiliki makna terjadinya perubahan-perubahan menyeluruh tentang struktur politik, berikut peran-peran dan pemegang peran didalam struktur ini.¹³

Aspirasi yang terjadi di Indonesia pada masa reformasi diimplementasikan dengan turun kejalan dengan cara demonstrasi. Ada beberapa tuntutan yang merupakan inspirasi rakyat yaitu :

1. Reformasi Politik.

Pada bidang ini rakyat meminta kepada pemerintah untuk memperbaharui sistem politik yang ada secara menyeluruh. Reformasi secara menyeluruh diartikan sebagai perubahan segenap substansi sistem atau kehidupan politik, baik berupa aspek kultur, struktur, proses dan produksi dari kehidupan politik Indonesia yang sedang diberlakukan dewasa ini. Berarti pula bahwa ideologi, konstitusi, penguasa, eksekutif, legeslatif, yudikatif, birokrasi, organisasi

¹¹. Lebih lanjut, lihat Andreas Uhlin, Op.Cit, hal. 188

¹². Syamsul Haris, *Reformasi Setengah Hati; Sebuah Gugatan Pengantar dan Reformasi Setengah Hati*, Erlangga, Jakarta, 1999. hal.9

¹³. Kacung Marijan, *Ketika makna reformasi dipahami, berbeda dalam dari balik suara kemasa*

Dengan kata lain pemerintah sebagai alat kekuasaan untuk menguasai rakyat. Berdasarkan pengalaman masa lalu itulah kemudian dirasakan dan sangat penting untuk melakukan reformasi hukum agar keadilan dapat tegak secara arif dan bijaksana. Dari ketiga hal tersebut mahasiswa hanya sebagai pressure group hanya dapat melakukan pengawalan demi berjalannya agenda reformasi.

3. Gerakan

Aksi-aksi mahasiswa berupa suatu gerakan ini dapat kita tinjau terlebih dahulu dari berbagai kerangka acuan yang dipakai sebagai basis gerakannya. Fenomena gerakan mahasiswa ini tidak terlepas dari spektrum gerakan sosial atau *social movement* yang ada. Dalam arti kata, gerakan mahasiswa muncul dengan mengikuti alur dan pola karakteristik dari suatu gerakan sosial tertentu.

Pusat dari strategi gerakan mahasiswa didapat dari melakukan suatu aktifitas analisis yang dilanjutkan dengan mengkritik kondisi kemasyarakatan untuk selanjutnya berupaya melakukan perubahan sosial. Gerakan mahasiswa dapat demikian muncul dan berkembang sebagai respon terhadap kondisi masyarakat di sekitarnya.

Sebelum kita membahas mengenai gerakan mahasiswa maka terlebih dahulu kita memahami pengertian atau konsep dari adanya suatu gerakan sosial. Hal ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa kemunculan gerakan mahasiswa pada hakekatnya merupakan akibat dari adanya aktifitas-aktifitas dari kelompok-kelompok yang ada di masyarakat yang melahirkan suatu kondisi yang

Gerakan sosial didefinisikan oleh David. F. Aberle sebagai :

“Suatu usaha yang terorganisir oleh sekelompok manusia untuk menimbulkan perubahan di hadapan tekanan manusia lainnya. Dibedakan dari usaha-usaha individu secara murni, dibedakan juga dari aksi kerumunan;..... dan gerakan sedemikian ini kemudian diklasifikasikan menurut jumlah perubahan (total atau partial) dan tempat perubahan (dalam sistem individu atau dalam sistem supra individual tertentu).”¹⁶

Definisi serupa walaupun dengan titik berat yang berbeda dikemukakan oleh Rudolf Haberle sebagai berikut :

“Gerakan disebut mengandung ... suatu gerakan bersama, suatu kekacauan di antara manusia, suatu kegelisahan, suatu usaha bersama untuk mencapai suatu tujuan yang divisualisasikan khususnya suatu perubahan dalam lembaga sosial tertentu.”¹⁷

Hakekat dari suatu gerakan sosial adalah perubahan, yaitu perubahan pada institusi sosial tertentu yang menjadi sasaran dari gerakan yang bersangkutan. Dalam arti kata, gerakan sosial mempunyai nilai krusial dalam proses reproduksi dan transformasi dari keseluruhan sistem sosial.

Gerakan sosial merupakan kekuatan memperjuangkan suatu sistem aksi sejarah yang telah mapan dan berusaha mengarahkan perkembangan masyarakat kedalam suatu saluran yang berbeda.

Suatu gerakan lebih merupakan satu kelompok yang bersimpati terhadap pandangan sosial atau doktrin tertentu, yang menempatkan dirinya dalam perdebatan politik sehari-hari dan untuk itu siap terlibat dalam partisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya untuk mewujudkan pandangan sosial

¹⁶. David. F. Aberle, *A Classification of Social Movement*, dalam *The Peyote Relegime Among the Navaho*, Aldine publishing Aberle Co; Chicago, 1966. hal.315. Lihat dalam Tom Bottomoro, *Sosiologi Politik*, Terj. Sahat Simamora, Bina Aksara, Jakarta, 1983. hal.29-30

yang diyakininya tersebut seperti demonstrasi atau pertemuan-pertemuan periodik lainnya.¹⁸

Nampaknya tidak mungkin bahwa gerakan seperti ini akan berhenti atau dihentikan karena kondisi-kondisi yang mereka perjuangkan masih ada dan masih harus ditransformil lebih lanjut.

Mobilisasi mahasiswa biasanya dapat terjadi karena adanya orientasi idealistik yang dipadukan dengan konsep-konsep moralitas yang luhur seperti keadilan, persamaan, kebebasan dan kebenaran yang secara cepat memperoleh dukungan mahasiswa. Kontradiksi antara idealisme yang kuat dan realitas empirik menghasilkan suatu gerakan mahasiswa yang terkadang bersifat militan.

Oleh karena itu gerakan-gerakan tersebut harus merumuskan suatu doktrin yang mampu meningkatkan ontosiasme dan komitmen untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Doktrin ini harus didasarkan pada suatu teori sosial yang dapat memperjelas berbagai permasalahan pokok, menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapainya serta menggaris bawahi bentuk-bentuk alternatif masyarakat.¹⁹

Dalam konteks perubahan, gerakan sosial mempunyai suatu ide kekuatan alternatif dan inovatif yang menempatkan ketidak senangan dan mengambil sikap oposan terhadap aturan politik dan sosial yang ada. Oleh karena itu gerakan sosial membawa nilai-nilai alternatif yang dianggap mampu mengatasi kondisi sosial yang ada. Gerakan sosial merupakan salah satu pokok dalam studi collective behavior. Collective behavior merupakan salah satu cabang dalam ilmu

sosial yang mempelajari bentuk-bentuk tindakan kolektif yang tingkat pelembagaannya rendah. Tingkah laku kolektif adalah bentuk tindakan kelompok yang lebih ditentukan oleh norma yang timbul secara spontan dari pada tindakan kelompok yang didasarkan atas norma-norma formal.²⁰

Lebih lanjut Turner & Killian mengemukakan pengertian tentang gerakan sosial sebagai berikut :

“ A social movement is a collectivity acting with some continuity to promote a change or resist a change in the society or group of which it is a part. As a collectivity, a movement is a group with indefinite and shifting membership, with leadership whose position is determined more by the informal response of the members than by formal procedures for legitimizing authority.”²¹

Artinya :

“Pergerakan sosial adalah suatu tindakan keseluruhan dengan kesinambungan untuk mempromosikan suatu perubahan atau melindungi suatu perubahan dalam masyarakat atau kelompok yang merupakan dari bagiannya. Secara keseluruhan, suatu pergerakan kelompok dengan tak tentu dengan keanggotaan shiting, dengan posisi kepemimpinan yang ditentukan dengan tanggapan informal dari anggota dibanding dengan prosedur formal untuk pengesahan otoritas.”

Dalam perkataan lain, gerakan sosial akan menggunakan cara-cara yang bersifat non institusional dalam melakukan suatu perubahan sosial. Hal ini dikemukakan oleh John Wilson sebagai berikut :

“ A social movement is a consious, collective organized attemp to bring abaout or resist large – scale change in the social order by non institutionalized means.”²²

²⁰. Turner & Killian, *collective Behavior*, Prentice hall, USA, 1957. p.3-4. Lihat pula dalam cetakan kedua, prentive – Hall, Englewood Clifis, NJ, 1972. hal 246

²¹. Ibid, p. 308

Artinya :

“Suatu pergerakan sosial adalah conscious, usaha kolektif terorganisir untuk menyempurnakan atau membalas perubahan besar-besaran didalam pesan sosial dengan non lembaga.”

Selanjutnya Wilson menjelaskan bahwa suatu gerakan sosial dapat dikenal melalui karakteristik sebagai berikut²³ :

1. Social movement are organized collectivity. Gerakan sosial merupakan kelompok yang teratur. Memang masih jauh berbeda dengan tingkat organisasi pada umumnya, namun sudah terdapat pembagian kerja dan pembedaan hirarkhi hak dan tanggung jawab diantara para partisan.
2. Social movement are large in potential scope. Banyak gerakan sosial yang kecil anggotanya, namun peran atau isu yang mereka perjuangkan memiliki potensi besar menambah jumlah keanggotaan menjadi lebih besar lagi.
3. Social movement are uninstitutionalized means to achieve their objectives. Suatu pola perilaku disebut institusional bilamana ia diterima masyarakat secara luas atau sebagian masyarakat. Banyak cara untuk mengepresikan kelesahan dan penyelesaian masalah sosial yang mendesak; mengajukan petisi, memilih badan pertimbangan yang representatif, melalui badan peradilan dan mengorganisir pemogokan. Parpol, kelompok kepentingan/penekan dan serikat dagang adalah beberapa contoh kelompok skala besar yang menggunakan taktik diatas. Gerakan sosial juga menggunakan cara diatas bila secara

perkumpulan yang muncul dan berkembang di dalam suatu gerakan sosial adalah tidak diinginkan, gerakan sosial merupakan suatu usaha “sadar” untuk merubah tatanan sosial.

Hal senada juga dikemukakan oleh Ritzer, dkk²⁴ yang menyebutkan ada lima karakteristik yang melekat pada suatu gerakan sosial, yaitu :

1. Suatu gerakan sosial melibatkan sebagian besar individu yang berusaha memperotes suatu keadaan. Agar dapat dikategorikan suatu gerakan sosial, maka usaha sejumlah individu tadi harus memiliki persyaratan dasar atau suatu organisasi.
2. Suatu gerakan sosial harus memiliki scope yang relatif luas. Gerakan tersebut mungkin berasal dari scope yang kecil, tetapi akhirnya harus mampu mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.
3. Gerakan sosial tadi dapat menggunakan berbagai macam taktik untuk mencapai tujuan,, taktik-taktik tersebut bervariasi dari yang sifatnya tidak menggunakan kekerasan sampai dengan menggunakan kekerasan.
4. Meskipun dalam gerakan sosial didukung oleh individu-individu tertentu, namun tujuan akhir dari gerakan tersebut merubah kondisi yang ada pada suatu masyarakat.
5. Gerakan tersebut merupakan usaha yang secara sadar dilakukan untuk mengadakan perubahan sosial. Dan bagi mereka yang terlibat

²⁴. Dikutip dari Haryanto, MA, *Analisis Tahap-Tahap Gerakan Mahasiswa Indonesia 1974 dan*

didalamnya mungkin tidak menyadari segala tindakannya tetapi mereka tetap mengetahui tujuan utama dari gerakan tadi.

Suatu aksi kolektif dapat berubah menjadi suatu gerakan sosial bila ia memiliki ideologi, solidaritas dan idealisme yang tinggi dan menitik beratkan pada aksi atau tindakan.²⁵

Sedangkan menurut Peter I. Rose,²⁶ Setiap gerakan sosial, apapun bentuknya mempunyai komponen-komponen pasti yaitu ideologi, program atau seperangkat tujuan, taktik untuk mencapai tujuan dan pemimpin. Lebih lanjut dikemukakan :

Ideology : is a set of beliefs and values that justify social conditions or that provide a unified criticism of those conditions and justify alternative patterns.

Goals : is the spesific defined conditions that a movement seeks to achiever.

Tactics : The specific, day to day actions taken to achieve stuted goals.

Leaders : Those who spek in the name of the group, help guide its efforts, serve as role models and inspire the rank and file.

Dengan demikian dapat ditarik suatu benang merah bahwa suatu prilaku kolektif dapat digolongkan kedalam suatu gerakan sosial apabila ia memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

²⁵. Leonard Broom, et, al. *Sosiology A Text With Adapted Readings*, seventh edition, Harper & Row pubs, New York, 1981.p. 469

²⁶. Peter. I Rose, et. al. *Sociology : inquiring into society*, Comfield press, San Fransisco, 1977.p.535. Dalam bab. 15. yang berjudul *social movement*, Rose, dkk menjelaskan

Artinya :

“Struktur yang kondusif, ketegangan struktural, pertumbuhan dan penyebaran kepercayaan disamaratakan, freicipating faktor, pengerahan keikutsertaan untuk aksi dan aplikasi pengawasan sosial.”

Herbert Blumer²⁸ mengemukakan bahwa mekanisme pertumbuhan suatu gerakan sosial menjadi terkorganisir meliputi :

“1)agitation; 2)development esprit decorps; 3)development of morale; 4)formalization of an ideologi; and 5)the development of operating tactics.” (Blumer, 1967).

Artinya :

“1). Hasutan; 2). Pengembangan jiwa; 3). Pengembangan moril; 4). Formalitas dari suatu ideologi; 5). Pengembangan dari taktik operasi.”

Pada dasarnya kemunculan dan perkembangan suatu gerakan sosial dapat dibedakan dalam 3 tahap penting, yaitu :

1. Masa inkubasi atau persiapan

Meliputi suatu kondisi sosial kemasyarakatan yang memungkinkan terjadinya gerakan sosial seperti stabilitas dan deferensiasi struktur sosial, perubahan yang meruntuhkan norma-norma masyarakat, tumbuh dan berkembangnya keyakinan umum akan keresahan yang melanda kehidupan masyarakat dan munculnya kejadian tertentu yang dapat memicu meledaknya gerakan.²⁹

²⁸ Ibid.

²⁹ Mark.N. Hagopian, Regimes, movement, and Ideologies:A Comparative Intruduction to political science, Longman, London, 1978. p. 262-264

2. Masa aksi

Merupakan tahap perwujudan tindakan secara nyata oleh pengikut gerakan. Pada saat ini orang-orang mempunyai kepribadian yang sama mulai mengadakan hubungan satu sama lainnya dan secara terbuka menyatakan kemarahan, ketidakpuasan, keresahan, dan tuntutan³⁰.

3. Masa Pelembagaan

Adalah tahap akhir dari suatu gerakan sosial. Biasanya suatu gerakan sosial setelah mencapai tujuannya ia mulai kesulitan memobilisasi massa sehingga lama kelamaan terpaksa mengalihkan kegiatan melalui organisasi formal yang lebih terstruktur atau gerakan tersebut sudah menjadi terintegrasi dengan masyarakat.³¹

Namun tidak semua gerakan sosial akan berakhir atau harus sampai pada tahap pelembagaan ini, tidak jarang terjadi suatu gerakan pada masa aksi berlangsung sudah dihentikan atau dibubarkan oleh penguasa.

3.1.2. Taktik-taktik perjuangan gerakan sosial.

Telah dikemukakan diatas bahwa ciri utama operasionalisasi dari suatu gerakan sosial adalah dengan menggunakan cara atau taktik-taktik yang bersifat unconvensional. Disebut unconvensional dikarenakan dalam menggunakan taktik ini menempuh jalur atau prosedur yang berada di luar jalur atau mekanisme politik formal dalam rangka usaha mencapai tujuan gerakan. Taktik-taktik unconvensional dalam prakteknya amatlah bervariasi berupa: gerilya, terorisme, penculikan, penyerangan, pengerusakan, intimidasi, sabotase, provokasi,

³⁰ ibid.

pendudukan, pemogokan, aksi diam, demonstrasi, rapat umum, aksi protes, pemboikotan, dan lain sebagainya.

Gene Sharp mengemukakan bahwa ada 6 kategori aksi atau tindakan dalam konflik. Keenam kategori ini meliputi bentuk aksi dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan, baik yang bersifat institusional ataupun non institusional, aksi-aksi tersebut meliputi:³²

“1) Simple verbal persuasion and related behavior such as conciliation; 2) peaceful institutional procedures backed by threat or use of sanctions; 3) physical violence against persons; 4) physical violence against persons plus material destruction; 5) material destruction only; and 6) the technique of non violent action.”

Artinya :

“1). Bujukan lisan yang sederhana dan berhubungan perilaku seperti permufakatan; 2). Prosedur kelembagaan yang didukung oleh ancaman atau sanksi; 3). Kekerasan fisik terhadap para orang; 4). Kekerasan fisik terhadap para orang di tambah pemusnahan material; 5). Hanya pemusnahan material saja; 6). Teknik bukan tindakan kejam.”

Tindakan persuasi verbal dan prosedur kelembagaan merupakan taktik-taktik konvensional. Tindakan persuasi seperti konsiliasi, kompromi, permohonan serta negosiasi merupakan usaha verbal yang rasional ataupun emosional untuk mendapatkan persetujuan “lawan” terhadap sesuatu yang diinginkan. Taktik ini dapat bersifat institusional dengan menggunakan prosedur yang ada maupun non institusional. Tindakan prosedur kelembagaan merupakan aksi yang bersifat institusional dengan demikian ia adalah cara konvensional untuk mencapai tujuan.

Kategori tindakan berikutnya yang melibatkan unsur kekerasan baik terhadap orang ataupun benda atau keduanya merupakan tindakan non
